

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai diatur dalam undang-undang ini.⁶

Kemudian menurut Retnowulan. Yag dimaksud kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁷

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan: (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. (2)

⁶ Dalam Rahayu Hartini. 2017. *Hukum Kepailitan Edisi revisi*. Malang. UMM Press. Hal. 19.

⁷ Dalam *Ibid*. Hal 19.

Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.⁸ Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihakpihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:⁹

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

⁸ Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 24.

⁹ H.Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung. Alumni. Hal. 72.

- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global. Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.¹⁰

Hukum Kepailitan Indonesia sebagai sub sistem dari Hukum Perdata Nasional harus merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem

¹⁰ Sudargo Gautama. 1998. *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 205.

hukum perdata (hukum perdata materiil) dan hukum acara perdata (hukum perdata formil). Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, selain memuat hukum materiil juga memuat hukum formil. Namun mengenai hukum acaranya, tidak diatur secara rinci. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* berlakulah Hukum Acara Perdata Perdata sebagaimana diatur dalam :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*het herziene indonesisch reglement*) S.Tahun 1941-4 disingkat RID/HIR
- b. Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Biuten Java en Madura*) S. Tahun 1927-227 disingkat RBg
- c. Reglemen Acara Perdata(*Reglement op de Rechtsverordening*) S.Tahun 1847-52 jo S. Tahun 1847-52 jo S.Tahun 1849-63 disingkat Rv

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia sebagaimna dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak cukup diatur mengenai kepailitan orang

perseorangan maupun kepailitan badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar hukum.¹¹

2. Maksud dan Tujuan Kepailitan

Seperti diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat. Begitu juga halnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan mempunyai maksud dan tujuan kepailitan.

Adapun maksud kepailitan ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut yang lazim disebut “budel”, dapat dibagi-bagikan secara adil antara seluruh kreditor dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak-hak istimewa, gadai dan hipotik. Selanjutnya tujuan kepailitan tersebut adalah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara perseorangan.¹²

Dengan demikian pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas seluruh kekayaan si berutang yaitu seluruh kekayaan si berutang disita, dan dibekukan untuk

¹¹ Syamsudin Sinaga, 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta. Tatanusa. Hal. 34-35

¹² Situmorang, Victor & Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 12-13.

kepentingan semua kreditor. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:¹³

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadinya kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas pari passu dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta

¹³ Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. Hal. 38-39.

kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

3. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibuat untuk kepentingan dunia usaha khususnya dalam penyelesaian permasalahan utang piutang. Untuk dapat mengakomodir permasalahan tersebut, dalam undang-undang tersebut tercakup beberapa asas diantaranya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas-asas tersebut antara lain adalah:¹⁴

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

¹⁴ Fahriza Nurul Safitri. 2012. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 48.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil maupun materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Syarat-Syarat Kepailitan

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jadi, pada dasarnya setiap debitor dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

a. Adanya Utang

Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Setiawan, SH, utang seyogyanya diberi arti luas baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.¹⁵

¹⁵ Setiawan. 1999. *Kepailitan serta Aplikasi Kini*. Jakarta. Tata Nusa. Hal. 15.

b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Yang dimaksud “utang yang telah jatuh tempo/ waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 adalah kewajiban untuk untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.

c. Adanya Debitor dan Kreditor

Pengertian Debitor menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah “Debitor” dan “Kreditor”, tetapi dipakai istilah si berutang (*schuldenaar*)/Debitor dan si berpiutang (*schuldeischer*)/Kreditor. Menurut Pasal 1235 KHU-Perdata di hubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata, si berutang (*schuldenaar*) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan

perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁶

d. Kreditor Lebih dari Satu

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

e. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus disebut dengan Pengadilan Niaga

Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan bahwa:¹⁷

- 1) Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* Hal. 115-116

¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 17.

- 2) Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
- 3) Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya.
- 4) Dalam hal debitor merupakan badan hukum, pengadilan dimana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

5. Pihak Yang Dapat Di Nyatakan Pailit

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan.¹⁸ Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum, maka berdasarkan hal ini dijabarakan sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas

¹⁸ Rahayu Hartini I. *Op. Cit.* Hal. 48.

persetujuan Suami/istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.

- b. Perserikaan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
- c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.
- d. Harta peninggalan, dimana debitor meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan yang dapat dijadikan harta untuk membayar utangnya. Sedangkan yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit.¹⁹

6. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya. *Op.Cit.* Hal. 16.

a. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:²⁰

- 1) Debitor melarikan diri

²⁰ Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 12.

- 2) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- 3) Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- 4) Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- 5) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau
- 6) Dalam hal lainnya yang menurut kejaksan merupakan kepentingan umum.

d. Bank Indonesia

Pengertian Bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung jawabkan.²¹

e. Menteri Keuangan

Kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik Negara yang seluruh

²¹ Fahriza Nurul Safitri. *Op.Cit.* Hal. 59.

modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

f. Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dijelaskan pada Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Sebelum adanya OJK, tugas-tugas di atas dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU OJK, peralihan kewenangan tersebut secara efektif berlaku sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 55 ayat 1 Undang – Undang OJK yaitu: “Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan

jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Pasca terbentuknya OJK berdampak pula pada kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan kini beralih kepada OJK.

7. Akibat Hukum Kepailitan

Kepailitan sebagai upaya penagihan yang tidak lazim dalam UUK telah menempatkan debitur dalam keadaan yang mesti salah dan tidak boleh diberikan ruang gerak untuk mencoba menata kembali kinerja keuangannya.²² Keterbatasan ruang gerak ini menyebabkan debitur di’ampu’ oleh kurator. Tentu saja hal tersebut telah menyebabkan perubahan-perubahan yang bukan hanya terbatas pada hubungan kreditor, debitur, dan harta pailit yang dimiliki debitur. Akibat-akibat berlaku dalam kepailitan

a. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit dan hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur, dimana debitur tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan

²² M. Hadi Shubhan. *Op.Cit.* Hal. 83.

hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengelolaan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya.²³ Sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu untuk diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit.

b. Akibat hukum terhadap seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator.

Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

²³ Sultan Remi Syahdeini, Op.Cit., hlm. 257.

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan Pasal 27 Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

c. Akibat hukum bagi kreditur

Pada dasarnya, kedudukan para kreditur sama (*partas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budelnya pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditur yang memenangkan hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Akibat hukum terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur pailit

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pernyataan pailit mempunyai akibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskannya pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu, hakim

pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan.

Jika dilihat, dalam pasal tersebut bahwa setelah ada pernyataan pailit, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitur apakah penyitaan atau penjualan, menjadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial menjadi gugur, bahkan sekalipun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, maka pelaksanaan itu harus dihentikan.

Menurut Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU, apabila hari pelelangan untuk memenuhi putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya masuk dalam harta pailit.

e. Akibat kepailitan terhadap pasangan debitur pailit

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istrinya).

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual suami/istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum

tercampur dalam harta pailit, maka istri atas suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dan PKPU, seperti diuraikan di atas maka setiap dan seluruh perbuatan hukum, termasuk perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali apabila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Selanjutnya gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokkan.

Dalam hal ini tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokkan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokkan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.²⁴

²⁴ Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 47.

f. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban timbal balik di antara para pihak atau ada elemen tukar menukar prestasi ada kedua belah pihak.⁷⁴ Selain itu, ilmu hukum menggolongkan perjanjian kedalam perjanjian tanpa beban dan perjanjian dengan beban. Suatu perjanjian dikatakan tanpa beban, jika perjanjian tersebut hanya melahirkan kewajiban atau prestasi pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa melahirkan kewajiban atau kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dengan beban jika perjanjian tersebut menerbitkan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi baik timbal balik satu terhadap yang lainnya atau kondisinya berlaku hal yang sama tanpa harus berimbang balik. Pada umumnya perjanjian dengan beban mengambil wujud perjanjian yang melahirkan kewajiban secara bertimbal balik.

Perjanjian yang lahir dari perbuatan atau perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana seseorang meminta sesuatu dengan kewajiban untuk melakukan hal lain bagi pihak ketiga yang diajukan oleh orang yang memberikan sesuatu tersebut, dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan beban yang tidak

mengambil wujud perjanjian yang berimbang balik. Perjanjian untuk pihak ketiga ini, dengan perjanjian bertimbang balik adalah perjanjian dengan beban yang tidak mengambil wujud perjanjian yang bertimbang balik dan dapat dilaksanakan. Maka debitur pailit yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak terkait dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut pada suatu jangka waktu tertentu.

Pihak lawan berhak meminta kepada hakim pengawas untuk menetapkan jangka waktu tersebut, jika kurator tidak memberikan keputusan atau persetujuan mengenai usulan jangka waktu yang telah diajukan. Jika dalam jangka waktu tersebut, baik yang disepakatai, maupun yang ditetapkan oleh hakim pengawas, kurator tidak memberikan jawaban atau secara tegas menyatakan tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut secara hukum dinyatakan berakhir dan pihak lawan dalam perjanjian, demi hukum menjadi kreditur konkuren atas harta pailit. Sebaliknya jika kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka pihak lawan dalam perjanjian diberikan hak untuk meminta kepada kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

g. Pembatalan dan Batal Demi Hukum

Perikatan-perikatan yang sedang berlangsung, dimana terdapat satu atau lebih kewajiban yang belum dilaksanakan oleh debitur pailit sedang putusan pailit telah diucapkan, maka demi hukum perikatan tersebut menjadi batal. Kecuali jika menurut pertimbangan kurator masih dapat dipenuhi dari harta pailit. Dengan konsekuensi hukum kepailitan tersebut, maka para kreditur tersebut secara bersama-sama menjadi kreditur konkuren atas harta pailit.²⁵

h. *Actio Paulina*

Actio pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan, asal dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, debitur dan orang dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan tindakan itu menyebabkan kerugian kepada kreditur. Ketentuan mengenai *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Ketentuan ini merupakan suatu perkecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Karena melalui *actio pauliana*, pihak ketiga

²⁵ *Ibid.* Hal. 50.

yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian.²⁶

Ketentuan mengenai *actio pauliana* sangat erat kaitannya dengan utang piutang. Pasal 1131 memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan adanya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, seorang debitur bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan segala kebendaan yang ia miliki. Namun tindakan tersebut tidak boleh merugikan kreditur.²⁷

Apabila ia tetap melakukan perbuatan yang merugikan kreditur, maka di sinilah peran *actio pauliana*. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak lawan dengan siapa debitur melakukan tindakan hukum mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.²⁸ Rumusan Pasal 1341 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan secara implisit bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu

²⁶ Wibowo Tunardy. 2012. *Actio Paulina*. <http://www.jurnalhukum.com>. Diakses tanggal 9 Oktober 2018. Pukul 03.27 WIB

²⁷ Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya. Hal. 163.

²⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. *Op.Cit*. Hal. 37.

perjanjian yang bertimbal balik, dan tindakan hukum yang bersifat sepihak.²⁹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi gugatan berdasarkan *actio pauliana*, yaitu:³⁰

- 1) Diajukan oleh kreditur yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan;
- 2) Diajukan terhadap tindakan hukum debitur, baik yang tidak diwajibkan oleh undang-undang maupun yang seharusnya ia laksanakan berdasarkan perjanjian.
- 3) Tuntutan diajukan hanya oleh kreditur yang dirugikan atas perbuatan hukum debitur
- 4) Kreditur harus membuktikan bahwa, baik debitur maupun pihak lawannya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur akan merugikan kreditur.

Pada syarat keempat, terdapat pengecualian apabila perbuatan yang dilakukan oleh debitur adalah perbuatan dengan cuma-cuma. Dalam hal ini kreditur cukup membuktikan bahwa debitur mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditur. Kreditur tidak perlu membuktikan adanya pengetahuan tersebut pada pihak yang menerima keuntungan dari debitur (Pasal 1341 ayat 3).³¹

²⁹ *Ibid.* Hal. 38.

³⁰ Herlien Budiono. *Op.Cit.* Hal. 165.

³¹ Wibowo Tunardy. *Loc.Ci.t*

8. Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi

Pasca diundangkannya UU OJK terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Hal ini berdampak pula pada pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi yang juga beralih ke OJK.³² Khusus untuk sektor perasuransian, tugas dan wewenang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa non bank, maka otomatis beralih kepada OJK. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang OJK yang berbunyi:

“Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Berdasarkan pada pasal ini, dapat diketahui bahwa adanya peralihan dalam fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan disektor jasa keuangan khususnya Perasuransian yang sebelumnya ada pada Menteri keuangan kemudian beralih kepada OJK. Pasal 55 UU OJK tersebut sekaligus menjadi sebuah “pasal Jembatan” bagi OJK untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

³² Muhammad Alfi, Etty Susilowati, Siti Mahmudah. 2017. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Diponegoro Law Journal. Volume 6. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal 2.

dan pengawasan pada sektor jasa perasuransian yang telah beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK.

Oleh karena itu pasca terbenuhnya OJK juga timbul akibat hukum pada kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya ada pada Menteri Keuangan kini beralih kepada OJK.

Dilihat dari peranan dan fungsi perusahaan asuransi yang cukup besar dalam menunjang perekonomian Negara Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan asuransi,³³ Sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, OJK membutuhkan alasan yuridis untuk pengajuannya. Salah satu alasan yuridis tersebut ialah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini nasabah pemegang polis asuransi.

³³ Sherlin Indrawati The. 2015. *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 5 Volume 3. Hal. 3.

B. Tinjauan Tentang Proses Pembuktian Dalam Kepailitan

1. Pembuktian Dalam Kepailitan

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG, kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang-Undang Kepailitan. Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Menurut Adrian Sutedi, syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (*concursum creditorum*).
- b. Harus ada utang
- c. Syarat utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- e. Debitur dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU).³⁵

Pembuktian sederhana (*sumir*) sebagai syarat ketentuan utama di dalam pemeriksaan perkara kepailitan diatur dalam Pasal

³⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hal. 31-32.

³⁵ Dalam Maliki. 2009. *Hukum Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 44.

8 ayat (4) UUK-PKPU yang menyatakan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Secara sederhana artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak/belum membayar lunas utang-utangnya. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.³⁶ Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tersebut di atas, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:³⁷

- a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo.

³⁶ Imran Nating. Op.Cit. Hal 23.

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 141.

- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.

Penyelesaian perkara kepailitan pada dasarnya adalah permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan cross check dengan si pemohon. Sehingga, bila alat buktinya cukup untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.³⁸

Dalam kaitannya dengan pembuktian, Majelis Hakim hendaknya memfokuskan pemeriksaan permohonan kepailitan pada dua hal di bawah ini :³⁹

- a. Apakah ada hubungan perutangan antara kreditor dan debitor, dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
- b. Apakah ada hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya.

Alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dalil pemohon pada proses pemeriksaan kepailitan adalah alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, atau dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Titel IX, Bagian Kedua, Buku IV, khususnya Pasal 1866 s/d Pasal 1945 KUHPerdara.

³⁸ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Hal 148.

³⁹ *Ibid*. Hal 149.

2. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Dalam Kepailitan

Hal-hal yang harus dibuktikan secara sederhana oleh hakim Pengadilan Niaga atas permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon adalah semua persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang substansinya tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, yaitu :

a. Memiliki Dua Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.⁴⁰

Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parteyang* mengandung arti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk pra kreditor dan hasil-hasilnya harus

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 107.

dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang harus ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.⁴¹

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan raison d'être-nya. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor diperbolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.⁴²

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan Pasal 1131 KUH Perdata

⁴¹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.* Hal. 29.

⁴² Setiawan. 2001. Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini. dalam Lontoh, Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang – Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung . Penerbit Alumni. Hal. 122.

sebagaimana diuraikan diatas, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

b. Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang. Pada Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena

perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga maupun timbul karena ketentuan Undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau right to payment.

c. Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dalam penjelasan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.⁴³

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang

⁴³ Imran Nating, *Op.Cit.*, Hal. 26.

yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”.

Kedua istilah itu sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan arena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya. Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Tidak harus suatu kredit bank dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai.

C. Tinjauan Umum Tentang Utang Dalam Kepailitan

1. Utang piutang menurut BW

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagaimana realisasi dari dua asas penting dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggungjawab debitor terhadap utang-utangnya.⁴⁴ Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam kedua pasal itu direalisasikan.⁴⁵

Pasal 1233 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena Undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, tindakan pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaarneming: negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-1357 KUH Perdata, dan pembayaran tak terutang (*paiment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata.

Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah antara lain : perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

- a. Perikatan dari pemimjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;

⁴⁴ Rahayu Hartini. 2014. *Aspek Hukum Bisnis* Cet. 7. Malang. Citra Mentari. Hal. 99.

⁴⁵ Siti Soemaryati Hartono. 19981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cet. 2. Yogyakarta. Liberty. Hal. 3-4.

- b. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi;
- c. Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutupi hak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan " utang ".

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku 111 KUHPerdara itu adalah:⁴⁶ “Suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara 2 orang yang memberikan hak kepada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”

Buku II KUHPerdara mengatur perihal hubungan-hubungan hokum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan). Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdara itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi Buku III KUHPerdara ini juga dinamakan "hokum perutangan". Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan

⁴⁶ R Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermasa. Hal. 122-123.

pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berutang atau debitor. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Melakukan suatu perbuatan
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan

Dari apa yang dikemukakan Subekti tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan utang atau kewajiban itu adalah segala kewajiban dari seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang timbul karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Bab III KUHPerdota.

2. Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta

kekayaan debitor. Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan pasal 1 butir 2 mendefinisikan kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang" dalam pasal 1 butir 4 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditor dapat dinyatakan pailit.